



BAB 1
RUANG LINGKUP SOSIOLOGI
PERTANIAN DAN POSISI
SOSIOLOGI PERTANIAN
DALAM PEMBANGUNAN
MASYARAKAT PEDESAAN

1.1. Definisi dan Ruang Lingkup Sosiologi Pertanian

Sosiologi pertanian merupakan cabang ilmu sosiologi yang berfokus pada studi tentang struktur sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial dalam konteks masyarakat pertanian dan pedesaan. Menurut Hawley (1981), sosiologi pertanian adalah "studi tentang interaksi antara pertanian dan masyarakat, termasuk dampak pertanian terhadap masyarakat dan sebaliknya, serta hubungan antara pertanian dan institusi sosial lainnya."

Ilmu ini mengkaji bagaimana aktivitas pertanian dan kehidupan pedesaan saling terkait dengan aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam suatu masyarakat. Sosiologi pertanian berupaya memahami realitas sosial masyarakat petani dan dinamika yang terjadi di dalamnya, serta bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap proses pembangunan pertanian dan pedesaan.

Ruang lingkup sosiologi pertanian sangat luas dan mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat petani dan dinamika sosial di pedesaan. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian sosiologi pertanian antara lain:

1. Struktur sosial masyarakat pertanian

Sosiologi pertanian mengkaji struktur sosial yang ada dalam masyarakat pertanian, termasuk stratifikasi sosial, sistem kekerabatan, dan pola pemukiman. Stratifikasi sosial merujuk pada pembagian masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan status sosial dan ekonomi, seperti pemilik lahan, petani penggarap, dan buruh tani (Shanin, 1972). Sistem kekerabatan dalam masyarakat pertanian seringkali memiliki peran penting dalam pengaturan hak dan kewajiban terkait penguasaan dan pengelolaan lahan pertanian (Wolf, 1966). Sementara itu, pola pemukiman masyarakat petani, baik yang terpusat maupun tersebar, dapat mempengaruhi dinamika interaksi sosial dan aksesibilitas terhadap sumber daya pertanian (Chayanov, 1966).

2. Interaksi sosial dalam masyarakat pertanian

Interaksi sosial menjadi fokus penting dalam kajian sosiologi pertanian. Interaksi ini meliputi hubungan antar individu, kelompok, dan lembaga sosial dalam masyarakat pertanian. Sosiologi pertanian menganalisis bagaimana pola interaksi tersebut terbentuk, dipertahankan, dan berubah seiring dengan dinamika sosial yang terjadi. Dalam konteks pertanian, interaksi sosial dapat dilihat dalam berbagai bentuk, seperti kerjasama dalam pengelolaan lahan, pertukaran tenaga kerja, dan pengambilan keputusan kolektif terkait aktivitas pertanian (Scott, 1976).

3. Perubahan sosial dalam masyarakat pertanian

Sosiologi pertanian juga mengkaji perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat pertanian, baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Perubahan sosial dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi pertanian, perubahan kebijakan pemerintah, dinamika pasar, dan pergeseran nilai-nilai budaya (Hayami & Ruttan, 1971). Dampak perubahan tersebut dapat terlihat pada aspek-aspek seperti struktur agraria, pola hubungan produksi, dan strategi nafkah rumah tangga petani. Sosiologi pertanian berupaya memahami proses perubahan sosial ini dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat petani.

4. Sistem penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian

Sosiologi pertanian memberikan perhatian khusus pada sistem penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penguasaan lahan merujuk pada hak dan kekuasaan untuk mengakses, mengelola, dan mengontrol sumber daya lahan. Pola penguasaan lahan dalam masyarakat pertanian dapat berbentuk hak milik pribadi, sewa, bagi hasil, atau kepemilikan komunal. Ketimpangan dalam penguasaan lahan seringkali menjadi isu krusial yang mempengaruhi dinamika sosial dan kesejahteraan petani (Griffin et al., 2002).

5. Kelembagaan sosial dalam masyarakat pertanian

Kelembagaan sosial memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat pertanian. Sosiologi pertanian mengkaji berbagai kelembagaan sosial yang ada, seperti kelompok tani, koperasi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kelembagaan ini berperan dalam mengorganisir kegiatan pertanian, memfasilitasi akses terhadap sumber daya, dan memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai pertanian (Uphoff, 1993). Selain itu, kelembagaan sosial juga menjadi wadah bagi petani untuk saling berbagi pengetahuan, membangun solidaritas, dan mengadvokasi kepentingan bersama.

6. Isu-isu sosial dalam pertanian dan masyarakat pedesaan

Sosiologi pertanian juga mengkaji berbagai isu sosial yang terkait dengan pertanian dan kehidupan pedesaan. Isu-isu tersebut antara lain mencakup kemiskinan, ketimpangan, migrasi, dan degradasi lingkungan. Kemiskinan dan ketimpangan seringkali menjadi permasalahan kronis dalam masyarakat pertanian, terutama pada petani gurem dan buruh tani (Chambers, 1983). Migrasi, baik dalam bentuk urbanisasi maupun migrasi internasional, juga menjadi fenomena yang sering terjadi akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi di pedesaan (Bryceson, 2019). Sementara itu, degradasi lingkungan, seperti erosi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran air, merupakan isu yang semakin mengemuka seiring dengan intensifikasi pertanian dan penggunaan input kimia yang berlebihan (Altieri, 1995).

Tabel 1 berikut ini merangkum berbagai aspek yang menjadi fokus kajian sosiologi pertanian yang telah diuraikan di atas:

Tabel.1. Aspek-aspek Kajian Sosiologi Pertanian

Aspek	Deskripsi
Struktur sosial	Stratifikasi sosial, sistem kekerabatan, pola pemukiman
Interaksi sosial	Hubungan antar individu, kelompok, dan lembaga sosial
Perubahan sosial	Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dinamika sosial
Sistem kepemilikan lahan	Hak milik, sewa, bagi hasil, hak ulayat
Kelembagaan sosial	Kelompok tani, koperasi, organisasi kemasyarakatan
Isu-isu sosial	Kemiskinan, ketimpangan, migrasi, degradasi lingkungan

Dengan memahami berbagai aspek tersebut, sosiologi pertanian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sosial dalam masyarakat pertanian dan pedesaan. Melalui kajian yang mendalam terhadap struktur sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, kelembagaan, dan isu-isu sosial yang ada, sosiologi pertanian dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks lokal. Ilmu ini juga berperan dalam mengidentifikasi permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat petani dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1.2. Peran Sosiologi Pertanian dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan

Sosiologi pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Ilmu ini memberikan landasan teoretis dan empiris untuk memahami realitas sosial masyarakat pertanian dan pedesaan, serta mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan. Kontribusi sosiologi

pertanian dalam pembangunan masyarakat pedesaan dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari perumusan kebijakan hingga pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat yang diuraikan sebagai berikut

1. Sosiologi pertanian berperan dalam menganalisis struktur sosial dan dinamika masyarakat pertanian.

Pemahaman tentang struktur sosial, seperti stratifikasi sosial, sistem kekerabatan, dan pola pemukiman, menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya, dalam konteks reformasi agraria, pemahaman tentang struktur penguasaan lahan dan ketimpangan sosial menjadi penting untuk merumuskan kebijakan redistributif yang efektif dan berkeadilan (Wiradi, 2009).

Selain itu, analisis terhadap dinamika sosial, seperti pola interaksi antar kelompok masyarakat dan kelembagaan sosial yang ada, juga penting untuk mengidentifikasi potensi konflik dan mencari solusi yang tepat. Misalnya, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pemahaman tentang dinamika sosial dapat membantu dalam mengembangkan mekanisme resolusi konflik dan membangun tata kelola yang lebih partisipatif dan inklusif (Fisher et al., 2000).

2. Sosiologi pertanian berperan dalam mengkaji permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat pertanian, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan marginalisasi.

Kemiskinan merupakan permasalahan kronis yang seringkali dihadapi oleh petani kecil dan buruh tani. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di pedesaan Indonesia mencapai 12,82%, jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan yang sebesar 7,38% (BPS, 2021).

Sosiologi pertanian berupaya mengungkap akar permasalahan kemiskinan tersebut, seperti keterbatasan akses terhadap lahan, teknologi, dan pasar, serta ketimpangan dalam penguasaan sumber daya (Tjondronegoro, 1984). Dengan memahami akar permasalahan tersebut, sosiologi pertanian dapat memberikan rekomendasi

kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Misalnya, melalui program reforma agraria yang disertai dengan dukungan modal, teknologi, dan akses pasar yang memadai (Wiradi, 2009).

3. Sosiologi pertanian berperan dalam menganalisis dampak sosial dari program pembangunan pertanian dan pedesaan.

Setiap program pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, seringkali memiliki tujuan dan target tertentu. Namun, tidak jarang program tersebut justru menimbulkan dampak sosial yang tidak diharapkan, seperti marginalisasi kelompok tertentu, peningkatan ketimpangan, atau bahkan konflik sosial (Scoones, 1998).

Sosiologi pertanian dapat memberikan analisis yang kritis terhadap dampak sosial tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Misalnya, dalam konteks pembangunan infrastruktur pertanian, seperti pembangunan bendungan atau jaringan irigasi, sosiologi pertanian dapat mengkaji dampak sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung, seperti kehilangan lahan atau pemukiman (Dharmawan, 2007). Melalui kajian tersebut, dapat dirumuskan strategi kompensasi dan rehabilitasi yang adil dan memadai bagi masyarakat yang terdampak.

4. Sosiologi pertanian berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Sosiologi pertanian menekankan pentingnya partisipasi masyarakat tersebut sebagai upaya untuk memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan konteks lokal masyarakat (Chambers, 1983).

Pendekatan partisipatif dalam pembangunan pertanian dan pedesaan dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti

perencanaan partisipatif, pengembangan kelompok tani, atau penguatan kelembagaan lokal (Uphoff, 1993). Melalui pendekatan ini, masyarakat bukan lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan di wilayahnya.

5. Sosiologi pertanian berperan dalam mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat pertanian.

Pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kapasitas dan posisi tawar masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik (Ife & Tesoriero, 2008). Dalam konteks pertanian, pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti penguatan modal sosial, peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi, serta pengembangan keterampilan dan kapasitas kelembagaan (Syahyuti, 2006).

Sosiologi pertanian dapat berkontribusi dalam mengembangkan strategi pemberdayaan yang efektif dan sustainabel dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat. Misalnya, dalam pengembangan kelembagaan petani, sosiologi pertanian dapat mengidentifikasi kelembagaan lokal yang sudah ada dan berfungsi dengan baik, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan kelembagaan tersebut. Dengan demikian, strategi pemberdayaan yang dikembangkan dapat memanfaatkan modal sosial yang sudah ada dan meminimalkan potensi konflik atau resistensi dari masyarakat.

6. Sosiologi pertanian berperan dalam mengembangkan pendekatan yang holistik dan integratif dalam pembangunan pertanian dan pedesaan.

Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan sinergi dan integrasi dari berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Sosiologi pertanian memberikan perspektif yang holistik dalam memahami keterkaitan antara aspek-aspek tersebut

dan mengembangkan strategi pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan di antaranya.

Misalnya, dalam konteks pengembangan sistem pertanian berkelanjutan, sosiologi pertanian dapat menganalisis keterkaitan antara praktik pertanian, kondisi sosial ekonomi petani, dan kelestarian lingkungan. Melalui analisis tersebut, dapat dikembangkan model pertanian yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkeadilan sosial, seperti sistem agroforestri atau pertanian organik (Altieri, 1995).

7. Sosiologi pertanian berperan dalam mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada petani kecil dan masyarakat marginal.

Dalam proses pembangunan, seringkali terjadi ketimpangan kekuasaan dan konflik kepentingan antara berbagai aktor, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Sosiologi pertanian dapat menjadi suara bagi kelompok-kelompok marginal tersebut dan mengadvokasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Advokasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti penelitian yang memberikan bukti empiris tentang dampak kebijakan terhadap masyarakat, pendampingan dan penguatan kapasitas kelompok marginal, serta membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih pro-petani kecil (Aspinall, 2005).

Dalam praktiknya, peran sosiologi pertanian dalam pembangunan masyarakat pedesaan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kompleksitas permasalahan sosial, keterbatasan sumber daya, serta dinamika politik dan kekuasaan yang tidak seimbang. Meskipun demikian, dengan pendekatan yang kritis, partisipatif, dan berbasis bukti, sosiologi pertanian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan pembangunan pertanian dan pedesaan yang lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat marginal.

1.3. Sejarah Perkembangan Sosiologi Pertanian

Sosiologi pertanian merupakan bidang ilmu yang relatif baru dalam khazanah ilmu-ilmu sosial. Meskipun demikian, akar sejarah dari sosiologi pertanian dapat ditelusuri jauh ke belakang, yaitu pada masa-masa awal perkembangan sosiologi sebagai disiplin ilmu. Sejarah perkembangan sosiologi pertanian tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakanginya, serta sumbangsih dari para pemikir dan ilmuwan yang berperan dalam mengembangkan bidang ilmu ini.

Pada masa-masa awal perkembangan sosiologi di abad ke-19, perhatian terhadap isu-isu pertanian dan masyarakat pedesaan belum terlalu menonjol. Para pemikir sosiologi klasik, seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Max Weber, lebih banyak berfokus pada analisis masyarakat industri dan perkotaan yang sedang berkembang pesat pada masa itu. Meskipun demikian, beberapa pemikir sosiologi klasik juga telah memberikan perhatian terhadap isu-isu pertanian dan pedesaan, meskipun belum secara spesifik menggunakan istilah "sosiologi pertanian".

Salah satu pemikir yang memberikan perhatian terhadap isu pertanian adalah Karl Marx. Dalam karyanya "Das Kapital" (1867), Marx menganalisis transformasi masyarakat dari sistem feodal menuju sistem kapitalis, termasuk dampaknya terhadap petani dan struktur agraria. Marx juga mengembangkan konsep "akumulasi primitif", yaitu proses perampasan tanah dari petani dan konsentrasi kepemilikan lahan pada segelintir elit, yang menjadi dasar bagi perkembangan kapitalisme (Marx, 1867).

Seentara itu, Max Weber, dalam karyanya "*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*" (1905), juga menyinggung tentang perubahan struktur agraria dalam kaitannya dengan perkembangan kapitalisme. Weber menganalisis bagaimana etika Protestan, khususnya Calvinisme,

mendorong semangat kapitalisme dan mempengaruhi transformasi masyarakat agraris menjadi masyarakat industri (Weber, 1905).

Meskipun Marx dan Weber telah memberikan perhatian terhadap isu-isu pertanian dan pedesaan, fokus utama mereka masih pada analisis masyarakat secara keseluruhan dan belum secara spesifik pada sosiologi pertanian. Perkembangan sosiologi pertanian sebagai subbidang yang spesifik baru mulai muncul pada awal abad ke-20, seiring dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap permasalahan pertanian dan pedesaan.

Salah satu tokoh penting dalam perkembangan awal sosiologi pertanian adalah Pitirim Sorokin. Dalam karyanya "*Social Mobility*" (1927), Sorokin menganalisis mobilitas sosial dalam masyarakat pertanian dan pedesaan di Rusia. Ia melihat bahwa stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian tidak hanya didasarkan pada kepemilikan lahan, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti keterampilan, pendidikan, dan koneksi sosial. Sorokin juga mengkritik pendekatan Marxis yang cenderung menyederhanakan stratifikasi sosial hanya berdasarkan kepemilikan alat produksi (Sorokin, 1927).

Tokoh lain yang berperan penting dalam perkembangan sosiologi pertanian adalah Alexander Chayanov. Dalam karyanya "*The Theory of Peasant Economy*" (1925), Chayanov mengembangkan teori tentang perilaku ekonomi petani yang berbeda dengan perilaku ekonomi dalam sistem kapitalis. Menurut Chayanov, petani tidak semata-mata berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan subsisten keluarga. Chayanov juga menganalisis dinamika demografi dan siklus keluarga petani dalam kaitannya dengan pengelolaan usaha tani (Chayanov, 1925).

Perkembangan sosiologi pertanian semakin menemukan momentumnya pada pertengahan abad ke-20, seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan pertanian dan pedesaan di berbagai belahan dunia. Pada masa ini, muncul berbagai studi dan penelitian yang secara

spesifik mengkaji isu-isu pertanian dan pedesaan dari perspektif sosiologi.

Salah satu karya penting pada masa ini adalah "*Peasant Society and Culture*" (1956) oleh Robert Redfield. Redfield mengembangkan konsep "*great tradition*" dan "*little tradition*" untuk menjelaskan dinamika perubahan sosial budaya dalam masyarakat petani. Menurut Redfield, masyarakat petani tidak terlepas dari pengaruh budaya dominan (*great tradition*) yang berasal dari pusat-pusat kekuasaan, namun pada saat yang sama juga memiliki budaya lokal (*little tradition*) yang khas dan berbeda dari budaya dominan (Redfield, 1956).

Studi-studi sosiologi pertanian pada masa ini juga semakin beragam dan mencakup berbagai isu, seperti reforma agraria, modernisasi pertanian, dan gerakan sosial petani. Misalnya, dalam konteks Amerika Latin, muncul studi-studi yang mengkaji gerakan sosial petani, seperti "*Peasant Movements and Land Reform in Latin America*" (1970) oleh Ernest Feder. Feder menganalisis perjuangan petani dalam menuntut reforma agraria dan menentang dominasi tuan tanah dan perusahaan-perusahaan besar di sektor pertanian (Feder, 1970).

Pada periode 1960-an hingga 1980-an, perkembangan sosiologi pertanian juga diwarnai oleh perdebatan teoritis antara pendekatan modernisasi dan dependensi. Pendekatan modernisasi, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Walt Whitman Rostow, memandang bahwa pembangunan pertanian dan pedesaan harus dilakukan melalui transfer teknologi dan modal dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Sementara itu, pendekatan dependensi, yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Andre Gunder Frank, justru mengkritik relasi ketergantungan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju dan menekankan pentingnya perubahan struktural dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di pedesaan.

Memasuki era 1990-an hingga saat ini, perkembangan sosiologi pertanian semakin dinamis dengan munculnya berbagai perspektif dan pendekatan baru. Salah satu perkembangan penting adalah munculnya

perspektif ekologi politik, yang mengkaji keterkaitan antara relasi kekuasaan, akses terhadap sumber daya alam, dan degradasi lingkungan dalam konteks pertanian dan pedesaan. Tokoh-tokoh seperti Piers Blaikie dan Harold Brookfield, melalui karyanya "*Land Degradation and Society*" (1987), memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan perspektif ini.

Selain itu, pendekatan-pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat juga semakin berkembang dalam sosiologi pertanian kontemporer. Pendekatan-pendekatan ini menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan lokal. Tokoh-tokoh seperti Robert Chambers, melalui karyanya "*Rural Development: Putting the Last First*" (1983), memberikan landasan penting bagi perkembangan pendekatan partisipatif dalam pembangunan pedesaan.

Perkembangan mutakhir dalam sosiologi pertanian juga ditandai dengan semakin menguatnya perhatian terhadap isu-isu seperti kedaulatan pangan, agroekologi, dan keadilan agraria. Berbagai gerakan sosial transnasional, seperti La Via Campesina, juga semakin aktif dalam memperjuangkan hak-hak petani dan masyarakat adat, serta menentang dominasi korporasi global dalam sistem pangan dunia. Dalam konteks ini, sosiologi pertanian dituntut untuk semakin peka dan kritis dalam mengkaji dinamika sosial politik yang kompleks dalam hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil.

Dengan demikian, sejarah perkembangan sosiologi pertanian menunjukkan dinamika pemikiran dan konteks sosial politik yang melatarbelakanginya. Dari akar-akar pemikiran sosiologi klasik, hingga perkembangan perspektif dan pendekatan mutakhir, sosiologi pertanian terus berkembang sebagai suatu bidang ilmu yang penting dalam memahami dan memberikan solusi bagi permasalahan pertanian dan pedesaan yang kompleks. Melalui dialog yang kritis dan konstruktif dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, sosiologi pertanian diharapkan dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi tercapainya

pembangunan pertanian dan pedesaan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.